



SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR

2 0 2 0

KORAN	HAL
Haluan	187
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2019**

**DPRD Minta Gubernur
Evaluasi Kinerja Setiap OPD**

PADANG, HALUAN— Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun 2019, melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung via telekonferensi, Jumat (5/6) lalu.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat memimpin jalan rapat mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

Untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, sambung Supardi, di samping capaian realisasi pendapatan, belanja, dan target kinerja pembangunan daerah, perlu dilihat juga sampai sejauh mana keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan amanat pasal 283 tersebut.

“Suksesnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ini

>> DPRD hal 07